

Vitalisasi Bahasa Bali: Tafsir Atas Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2018

I Ketut Darma Laksana
Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Udayana
darmalaksana2020@gmail.com

Abstrak

Setiap suku bangsa berupaya agar bahasa ibunya tetap hidup sebagai pendukung kebudayaan daerahnya. Dalam hal ini, pemerintah daerah Bali telah menurunkan Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2018, khususnya Bab IV, Pasal 6, yang berbunyi: “Aksara Bali wajib ditempatkan di atas dalam pemberian nama”. Bunyi peraturan tersebut jelas tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah, dalam hal ini, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Jakarta, yang telah memasyarakatkan apa yang dinamakan *Trigatra Bangun Bahasa*, yang isinya: Utamakan bahasa Indonesia, Lestarikan bahasa daerah, dan Kuasai bahasa asing. Makna utamakan bahasa Indonesia menunjuk pada kewajiban menempatkan bahasa Indonesia di atas dalam penulisan nama badan/lembaga ataupun tempat. Peraturan gubernur tersebut sempat mengundang polemik di kalangan akademisi. Secara akademis, makalah ini mencoba memberikan tafsiran atas kebijakan pemerintah daerah Bali melalui peraturannya tersebut berdasarkan metode historiografi linguistik yang diaktualisasikan oleh perubahan paradigma menurut pandangan beberapa ahli, seperti Pierre Bourdieu (1991), Clifford Geertz (1992), dan George Lakoff dan Mark Johnson (1980). Penafsiran yang dilakukan menghasilkan simpulan yang berikut. Pertama, kebijakan yang dibuat melalui Peraturan Gubernur Bali tersebut secara simbolis telah berhasil memanfaatkan “hubungan bahasa dengan kekuasaan” (Bourdieu). Kedua, sesuai dengan pandangan mengenai perilaku orang Bali seperti “ayam jago” bahwa pemerintah bagaikan pahlawan atau orang kuat (Geertz). Ketiga, kebijakan yang dibuat dapat diterima tanpa dasar kekuasaan ataupun kekuatan apa pun karena penempatan aksara Bali di atas dalam penulisan nama mengandung nilai estetis, yang secara metaforis (Lakoff dan Johnson), menyerupai tubuh manusia. Aksara Bali di atas mengibaratkan kepala manusia, sedangkan penulisan bahasa Indonesia di bawah aksara Bali dengan huruf yang lebih besar mengibaratkan badan manusia. Hubungan antara kepala dan badan tersebut cukup indah dipandang mata.

Kata kunci: peraturan gubernur dan kekuasaan simbolik

Abstract

Each ethnic group strives to keep their mother tongue alive as a supporter of their regional culture. In this case, the regional government of Bali has issued Governor Regulation Number 80 of 2018, specifically Chapter IV, Article 6, which reads: "Balinese script must be placed above in naming". The sound of this regulation is clearly not in line with government policy, in this case, Language Development and Cultivation Agency, Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia, Jakarta, which has promoted what is called the *Trigatra Bangun Bahasa*, which contains: Prioritize Indonesian, Preserve regional languages, and Master foreign languages. The meaning of prioritizing Indonesian refers to the obligation to place Indonesian at the top in writing the name of the state/institution or place. The governor's regulation had sparked polemics among academics. Academically, this paper attempts to provide an interpretation of the policies of the local government of Bali through these regulations based on linguistic historiography method that actualized by the paradigm shift

according to the views of several experts, such as Pierre Bourdieu (1991), Clifford Geertz (1992), and George Lakoff and Mark Johnson (1980). The interpretation made resulted in the following conclusions. First, the policy made through the Bali Governor's Regulation has symbolically succeeded in utilizing "the relationship between language and power" (Bourdieu). Second, according to the view of the behavior of Balinese people like "cock fight" that the government is like a hero or a strong man (Geertz). Third, the policies made can be accepted without any basis of power or strength because the placement of the Balinese script above in the writing of names contains aesthetic value, which metaphorically (Lakoff and Johnson) resembles the human body. The Balinese script above represents head, while writing Indonesian under Balinese script in larger letters represents body. The relationship between the head and the body is quite beautiful to the eye.

Keywords: *governor regulations and symbolic power*

1. Pendahuluan

Bahasa Bali sebagai bahasa standar yang diajarkan di sekolah-sekolah dari tingkat sekolah dasar sampai ke tingkat menengah atas, bahkan di perguruan tinggi khususnya jurusan sastra Bali, semakin memperlihatkan vitalisasinya sebagai pendukung kebudayaan Bali. Selain itu, usaha vitalisasi itu semakin gencar dilakukan dalam bentuk perlombaan pidato dalam bahasa Bali, perlombaan menulis puisi, ataupun cerita pendek. Pemelajaran bahasa Bali melalui media mainstream seperti televisi dan surat kabar juga dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan daya hidup dan daya juang bahasa yang bersangkutan.

Dalam era digital dewasa ini, vitalisasi bahasa Bali dilakukan dengan memanfaatkan internet dengan unggahan lawak, cerita rakyat, dan sejenisnya yang dapat disimak oleh masyarakat luas. Akan tetapi, vitalisasi yang berlangsung terus itu menimbulkan pertanyaan masyarakat: apakah yang divitalisasi itu bahasa atau aksaranya. Apa yang termuat dalam peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018, Bab IV, Pasal 6 yang berbunyi “Aksara Bali wajib ditempatkan di atas dalam penulisan nama” mengandung pemahaman sebagai berikut. Pertama, yang berkaitan dengan penulisan nama dengan aksara Bali bukan aksara Bali yang dilatinkan. Hal ini dapat ditafsirkan sebagai vitalisasi bidang budaya bahwa ada pemikiran untuk lebih mementingkan pemahaman tentang aksara daripada huruf Latin yang sudah terbiasa dikuasai dengan baik, khususnya di kalangan peserta didik.

Kedua, penempatan aksara Bali di atas nama bahasa Indonesia agar tidak diartikan sebagai “pengutamaan” bahasa Bali karena hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 (lihat Darma Laksana, 2019). Khususnya tentang kebijakan pengaturan tata hubungan masalah kebahasaan di Indonesia telah

tertuang dalam moto *Trigatra Bangun Bahasa*, yang sudah disosialisasikan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang berbunyi: Utamakan bahasa Indonesia, Lestarikan bahasa daerah, dan Kuasai bahasa asing. Sehubungan dengan itu, perlu ada pemahaman bahwa konsep vitalisasi bahasa untuk tujuan pelestariannya tidak harus penempatannya di atas.

Penerapan peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah Bali tersebut akan dicoba dikaji lebih jauh dengan menerapkan pandangan beberapa ahli, seperti Pierre Bourdieu (1991) dengan pemikirannya tentang “Bahasa dan Kekuasaan Simbolik”, Clifford Geertz (1992) dengan konsep tentang perilaku orang Bali ibarat “ayam jago”, dan George Lakoff dan Mark Johnson (1980) tentang “metafora” yang secara alami mewarnai kehidupan manusia. Selain itu, terdapat inovasi dalam hal pewarnaan huruf, yakni warna “merah-putih”, meskipun belum konsisten, mengingatkan imajinasi kita tentang bendera merah-putih bangsa Indonesia (Lihat Lampiran).

2. Metode

Dengan penerapan metode Historiografi Linguistik (Khun, 1962; lihat juga Kridalaksana, 1980) dapat diketahui perjalanan vitalisasi bahasa Bali, menurut zamannya (Foucoult, 1991), dari dahulu sampai sekarang. Berdasarkan perjalanan sejarah vitalisasi bahasa yang bersangkutan dapat dikatakan bahwa proses pemelajarannya di sekolah-sekolah, misalnya, berbasis pada faktor kognitif, yaitu pemerolehan ilmu pengetahuan, yang secara afektif dapat memengaruhi sikap pemelajar. Namun, faktor psikomotorik sangat penting karena pemelajar memiliki kemampuan melakukan sesuatu dalam praktik yang membawa perubahan sikap dari menerima ke proses interaktif. Dengan perkembangan teknologi mutakhir, dapat dilihat terjadinya perubahan paradigma mengenai proses vitalisasi bahasa Bali itu sendiri. Hal ini sangat jelas sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018, Bab IV, Pasal 6 bahwa telah terjadi perubahan wujud vitalisasi. bahasa Bali. Selanjutnya, pengumpulan data dilakukan dengan mencatat nama-nama di ruang publik, baik secara langsung di lapangan maupun melalui YouTube/Goegle Map dengan wilayah pengamatan yang terbatas di daerah Denpasar dan sekitarnya.

3. Hasil

Praktik penulisan nama-nama di ruang publik oleh para pemangku kebijakan dapat dikemukakan sebagai berikut: (1) tata cara penulisan, (2) karakter huruf, dan (3) pewarnaan nama-nama.

3.1 Tata Cara Penulisan Nama

3.1.1 Nama yang tunggal dalam bahasa Indonesia.

Penulisan nama yang tunggal dalam bahasa Indonesia masih dapat ditemukan, baik yang lama maupun yang baru. Padahal, peraturan gubernur tersebut telah memasuki tahun kelima. Bahkan, ada penulisan nama terbaru di ruang publik. Akan tetapi, yang jelas dapat diamati adalah penulisan nama dalam bahasa Indonesia dengan huruf kapital dan wujudnya jauh lebih besar daripada aksara Bali.

(1) Nama yang sudah lama

Misalnya:

-INNA BALI HERITAGE Hotel (Denpasar)

-KAWASAN HERITAGE JALAN GAJAH MADA (Denpasar)

-RSUD MANGUSADA (Kapal, Badung)

-RSU MANUABA (Denpasar)

-TAMAN RAMA SHINTA (Mengwi, Badung)

(2) Nama yang terbaru

Misalnya:

-SENTRAL PARKIR TAMAN RAMA 2 (Denpasar)

3.1.2 Nama yang sudah dituliskan secara lengkap

Penulisan nama yang sudah mencantumkan aksara Bali dan bahasa Indonesia, yang dibedakan atas: (a) aksara Bali di atas bahasa Indonesia, dan (b) aksara Bali di bawah bahasa Indonesia. Jadi, penulisan nama yang dilakukan memang sudah lengkap, tetapi berbeda tata letak

antara aksara Bali dan bahasa Indonesia. Nama-nama sekolah dari tingkat sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah atas sudah secara konsisten menempatkan aksara Bali di atas. Sementara itu, nama-nama jalan sebagian menempatkan aksara Bali di atas dan sebagian menempatkannya di bawah bahasa Indonesia.

(1) Aksara Bali di atas

Aksara Bali yang ditempatkan di atas bahasa Indonesia sudah sesuai dengan peraturan gubernur.

a. Nama Lembaga

Misalnya:

-aksara Bali

KANTOR GUBERNUR BALI

-aksara Bali

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BA

-aksara Bali

PEMERINTAH PROVINSI BALI DINAS KEBUDAYAAN

-aksara Bali

PENGADILAN NEGERI KELAS 1A DENPASAR

-aksara Bali

KANTOR WALIKOTA DENPASAR

b. Nama Bank

Misalnya:

-aksara Bali

BANK INDONESIA

-aksara Bali

BANK BRI

-aksara Bali

KANTOR CABANG MANDIRI

-aksara Bali

BANK BPD BALI

-aksara Bali

BANK DANAMON

c. Nama Hotel

Misalnya:

-aksara Bali

HOTEL HARRIS

-aksara Bali

HOTEL LINGSAR

-aksara Bali

SWISS—BELHOTEL

-aksara Bali

HOTEL VIKING

d. Nama Pasar

Misalnya:

- aksara Bali

PASAR BADUNG

-aksara Bali

UNIT PASAR SANGLAH

-aksara Bali

FRESHINDO

e. Nama Jalan

Misalnya:

-aksara Bali

TOL BALI MANDARA

-aksara Bali

JL. BASUKI RAHMAT

-aksara Bali

JL. SULAWESI

-aksara Bali

JL. LETDA TANTULAR

-aksara Bali

JL.KEN DEDES

2.. Aksara Bali di bawah

a. Nama Lembaga

Misalnya:

-TRANS STUDIO MALL

aksara Bali

-BANJAR BELONG GEDE

aksara Bali

b. Nama Jalan

Misalnya:

-JL. COKROAMINOTO

aksara Bali

-JL. MT HARYONO

aksara Bali

-JL. PB SUDIRMAN

aksara Bali

-JL. VETERAN

aksara Bali

-JL. DIPONOGORO

aksara Bali

3.2 Karakter Huruf

Aksara Bali dalam contoh-contoh di atas secara konsisten dituliskan dengan karakter huruf yang lebih kecil, baik di atas maupun di bawah bahasa Indonesia. Hal ini berarti bahwa peraturan pemerintah daerah Bali tersebut tetap menjunjung moto dalam *Trigatra Bangun Bahasa*, yakni mengutamakan bahasa Indonesia dengan cara menuliskannya dengan huruf kapital dan bentuknya lebih besar daripada aksara Bali. Hal ini dapat ditafsirkan sebagai “pengutamaan” bahasa Indonesia.

3.3 Pewarnaan Nama

Ada hal yang menarik yang perlu dicatat di sini ialah bahwa nama-nama yang tampil di ruang publik diatur pewarnaannya, dalam hal ini, warna merah-putih. Meskipun belum konsisten, hal yang demikian itu tentu menggambarkan jati diri bangsa Indonesia bahwa warna “Merah-Putih”, sebagai bendera kebangsaan kita, merupakan kebanggaan nasional. Jadi, pewarnaan nama-nama dapat dikatakan sebagai sebuah inovasi menarik yang mungkin tidak disadari sebelumnya.

Misalnya,

-aksara Bali (merah)

I GUSTI NGURAH RAI, AIRPORT (putih)

-aksara Bali (merah)

RSUD WANGAYA KOTA DENPASAR (putih)

-aksara Bali (merah)

PELABUHAN SANUR (putih)

-aksara Bali (merah)

PANTAI MATAHARI TERBIT (putih)

-aksara Bali (merah)

TERMINAL UBUNG (putih)

4. Pembahasan

4.1 Perubahan Paradigma

Perjalanan waktu dari zaman ke zaman memengaruhi perubahan sikap atau pandangan, yang secara ilmiah disebut sebagai perubahan paradigma. Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 merupakan paradigma mutakhir yang diharapkan dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Secara tradisional, vitalisasi bahasa Bali berlangsung melalui pembelajaran di sekolah-sekolah dan cerita-cerita yang disampaikan oleh tukang cerita di rumah-rumah. Kemudian, tumbuhnya daya hidup bahasa Bali berlangsung lebih modern, yakni berupa lomba-lomba, seperti lomba pidato dan menulis cerpen. Selanjutnya, melalui media mainstream, seperti surat kabar daeran dan televisi, vitalisasi bahasa Bali cukup berjalan lancar. Terakhir, dalam era teknologi mutakhir ini, vitalisasi Bahasa Bali bisa melalui pembelajaran di Goegle ataupun YouTube. Pada era digital ini, aneka gawai dan perangkat lunak dapat dimanfaatkan dalam pemerolehan informasi, termasuk pengawasan penulisan nama di ruang publik.

4.2 Bahasa dan Kekuasaan Simbolik

Pemberlakuan Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018, Bab IV, Pasal 6 mengisyaratkan adanya hubungan bahasa dengan kekuasaan simbolik. Pejabat atau penguasalah yang berwenang memerintah serta memutuskan apa yang terbaik yang harus dilakukan oleh masyarakat. Apa yang dianggap terbaik oleh pemimpin maka rakyat wajib mematuhi. Meskipun perturan gubernur tidak sejalan dengan aturan pusat, jika memang ada alasan yang masuk akal, maka masyarakat tinggal mengikutinya.

Kekuasaan simbolik memang bersifat abstrak sehingga yang berperan sangat penting adalah bahasa itu sendiri. Bahasa yang terangkai dalam peraturan gubernur sudah jelas memiliki fungsi, yaitu “pasar linguistik”, ibarat tempat jual beli barang-barang dagangan, yaitu “pasar” (lihat Bourdieu, 1991).

4.3 Ibarat Ayam Jago

Dibandingkan Pulau Jawa yang tidak berbentuk, Pulau Bali yang menyerupai ayam jago atau ayam aduan (*cock fight*) mengandung “kuasa” pula. Ayam jago sebagai simbol kejantanan memiliki kekuatan untuk mengalahkan lawannya. Jadi, dalam dunia nyata kekuatan atas kekuasaan yang dimiliki pemimpin dapat memenangkan pertarungan demi kepentingan rakyatnya. Demikianlah hal yang sama dapat dilihat pemberlakuan peraturan gubernur mengenai penulisan nama di ruang publik.

4.4 Perbandingan

Kehidupan manusia di dunia nyata ini selalu dipenuhi oleh perbandingan-

perbandingan. Dalam hubungannya dengan penulisan nama-nama di ruang publik, konsep tubuh manusia diterapkan demikian rupa: kepala di atas, sedangkan badan di bawah. Sebagaimana tubuh manusia, maka kepala lebih kecil bentuknya daripada badan. Hal inilah yang menarik, tanpa terpikirkan oleh manusia itu sendiri, bahwa apa yang telah tercipta dalam penulisan nama di ruang publik. dalam Bahasa Inggris disebut *metaphorical embodiment*.

4.5 Pewarnaan

Sadar atau tidak, masalah pewarnaan kemungkinan juga belum terpikirkan dalam perwujudan nama-nama di ruang publik sehingga hasil pewarnaan tidak konsisten. Warna “merah-putih” ternyata muncul dalam nama. Warna merah terdapat pada tulisan aksara Bali, sedangkan warna putih terdapat pada tulisan bahasa Indonesia. Hal ini sejalan dengan lambang kebanggaan nasional, yakni Berdaerah Merah-Putih, Jika pewarnaan ini dilakukan secara konsisten, tentu sangat indah selain nilai patriotis yang tinggi.

5. Simpulan

Tampaknya perlu disosialisasikan lagi lebih intens supaya diperoleh penulisan nama yang sesuai dengan bunyi peraturan gubernur. Jika dilakukan secara konsisten, Bali akan menjadi sorotan masyarakat luas sebagai percontohan praktik baik tentang penulisan nama di ruang publik.

6. Daftar Pustaka

- Bourdieu, Pierre, 1991 (2020). *Bahasa dan Kekuasaan Simbolik* (Stephanus Aswar Herwinarko, Penerj.). Yogyakarta: TROSoD.
- Darma Laksana, I Ketut. 2019. “Penguatan Pengawasan Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik: Kasus di Daerah Pariwisata Kecamatan Nusa Penida”. Makalah disajikan dalam SEMINAR DAN LOKAKARYA Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik: Perkuat Pengawasan, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), 5-8 Agustus 2019.
- Foucault, Michel. 2016. *Arkeologi Pengetahuan*. (Inyik Ridwan Musir, Penerj.). Yogyakarta: Pelangi.
- Geertz, Clifford. 1991. *Tafsir Kebudayaan*. (F.B. Hardiman, Penerj.). Yogyakarta: Kanisius.
- Khun, T.S. 1962. *The Structure of Scientific Revolution*. Chicago: Chicago University Press.
- Kridalaksana, Harimurti. 1980. “Rintisan dalam Historiografi Linguistik Indonesia”. Dalam Ayatrohaedi, ed., *Seri Penerbitan Ilmiah*. Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
- Lakoff, G. dan Mark Johnson. 1980. *Metaphor We Live By*. Chicago: Chicago University Press.
- MacCormac, E.R. 1985. *A Cognitive Theory of Metaphor*. Cambridge: The MIT Press.

